

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Landasan pelaksanaan pembangunan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hakikat pembangunan ialah rangkaian upaya perkembangan dan perubahan yang dilangsungkan secara sadar, sengaja, berencana, dan bertujuan oleh satu kelompok manusia (orang, suku, rakyat, bangsa dan negara) menuju pada modernitas dan taraf kehidupan yang lebih tinggi.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang ditunjukkan bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di pedesaan maka bagi kelangsungan kegiatan pembangunan lebih diarahkan kepada pembangunan pedesaan, sehingga pembangunan nasional akan berhasil apabila pembangunan pedesaannya meningkat.

Hak dalam melaksanakan pembangunan desa juga diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tersebut yaitu, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah desa menjadi wilayah pemukiman industri atau jasa wajib mengikutsertakan Pemerintahan Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kepala Desa yang merupakan pemimpin tertinggi haruslah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pada Pasal 14 adalah :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintah.

Urusan pemerintah yang diselenggarakan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerjasama antar desa.

2. Menyelenggarakan Urusan Pembangunan.

Urusan pembangunan yang dimaksud antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, dan pasar desa.

3. Menyelenggarakan Urusan Kemasyarakatan.

Urusan kemasyarakatan yang dimaksud antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

Pemerintah desa merupakan pemerintahan formal dari kesatuan masyarakat desa, sebagai badan kekuatan terendah, Pemerintahan Desa memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri (Otonomi Daerah) serta wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahaan dari pemerintahan diatas, dimana desa tempat segala urusan dari segenap unsur masyarakat desa.

Kepala Desa (Kades) merupakan penyelenggaraan dan sekaligus penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan didalam wilayahnya. Disamping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa (Kades) juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan dibidang kemasyarakatan, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat.

Adapun yang menjadi prioritas pemerintah Desa Setu Kulon saat ini yaitu dalam membangun infrastruktur yang secara merata dan menyeluruh serta membuat Desa Setu Kulon lebih baik. Fasilitas infrastruktur yang ada di Desa Setu Kulon Kabupaten Cirebon yang sudah ada dari masa jabatan Kepala Desa (Kades) yang lama adalah adanya sarana rumah ibadah, sarana pendidikan, posyandu, tempat pembuangan sampah, poskamling, gor, drainase yang kesemuanya tersebut dalam kondisi baik. Namun ada beberapa hal yang belum maksimal seperti pembangunan infrastruktur akses jalan menuju ke desa masih rusak, selain itu juga Kepala Desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di desa dalam keputusannya dinilai belum maksimal, hal ini ditandai dengan tidak efektifnya pembangunan yang dilaksanakan, ada beberapa pembangunan yang dinilai mubazir seperti pembangunan infrastruktur Gedung serbaguna semenjak didirikan sampai dengan saat ini tidak digunakan dan keterbatasan sumber pendanaan dari Kabupaten dan Provinsi juga merupakan faktor yang menyebabkan lambatnya proses pembangunan di desa.

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan diatas maka masalah pokok yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah pentingnya Kepemimpinan Kepala Desa

Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Setu Kulon Kabupaten Cirebon. Desa Setu Kulon dipimpin Oleh Kepala Desa (Kades), Kepala Desa bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian, memelihara ketentraman dan ketertiban desa. Kemudian kewajiban Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa, serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam serta mengukur sejauh mana **“KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SETU KULON KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON”**.

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut **“Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon ”**

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis berusaha untuk merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Setu Kulon ?

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Setu Kulon ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan kepala desa untuk mengatasi hambatan – hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Setu Kulon ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memperoleh data tentang permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan dengan tujuan utama sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Setu Kulon.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Setu Kulon.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Setu Kulon.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Kepemimpinan.

- b. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Kepemimpinan. Dapat menumbuhkan inspirasi baru dan mengembangkan ide-ide pemikiran sehubungan dengan peran kepemimpinan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Desa Setu Kulon dalam menjalankan peran agar dapat lebih mengetahui peran Kepemimpinan.
- b. Sebagai bekal pengalaman dan pengetahuan dalam menghadapi tugas-tugas dimasa yang akan mendatang,

1.6 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah saat ini semakin diupayakan secara maksimal oleh pemerintah, maka perlunya peran kepemimpinan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator utama dalam keberhasilan otonomi daerah adalah kepemimpinan daerah itu sendiri. Hal ini disebabkan kepemimpinan merupakan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di daerah.

Kepemimpinan dalam konteks struktural tidak hanya terikat pada bidang atau sub bidang yang menjadi garapannya, tetapi juga oleh rumusan tujuan dan program pencapaiannya yang telah ditetapkan oleh pemimpin yang lebih tinggi posisinya. Setiap anggota harus melaksanakan tanpa menyimpang. Sehingga dalam

hal ini kepemimpinan diartikan sebagai proses pemberian motivasi agar orang-orang yang dipimpin melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Rivai (2007:4)

Kepemimpinan resmi (formal) adalah “seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin, atas dasar keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan posisinya. Pola ini terlihat pada sebagian ketentuan yang mengatur hirarki organisasi dan biasanya tergambar dalam bagan organisasi”.

Kartono (2002:153)

Kepemimpinan adalah “kemampuan untuk mempengaruhi yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah direncanakan selanjutnya dikatakan pemimpin harus mahir melaksanakan kepemimpinannya”.

Selanjutnya pendapat Rivai (2007:5) Kepemimpinan dapat dibagi menjadi beberapa hal yaitu :

1. Tanggung jawab yaitu kesanggupan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.
2. Supervisi yaitu suatu usaha menstimulir, mengkoordinir dan membimbing serta kontiniu seorang pekerja baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pekerja, sehingga dengan demikian mereka mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat modern.
3. Inisiatif yaitu kemampuan untuk mengevaluasi secara mandiri untuk mengambil kendali dalam suatu situasi sebelum orang lain bertindak.

Pelaksanaan pembangunan perlu adanya suatu usaha dan proses menurut Khairuddin (2004:24) yang dinyatakan oleh Siagian Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya, keadaan yang lebih baik yang didambakan oleh masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Usaha atau

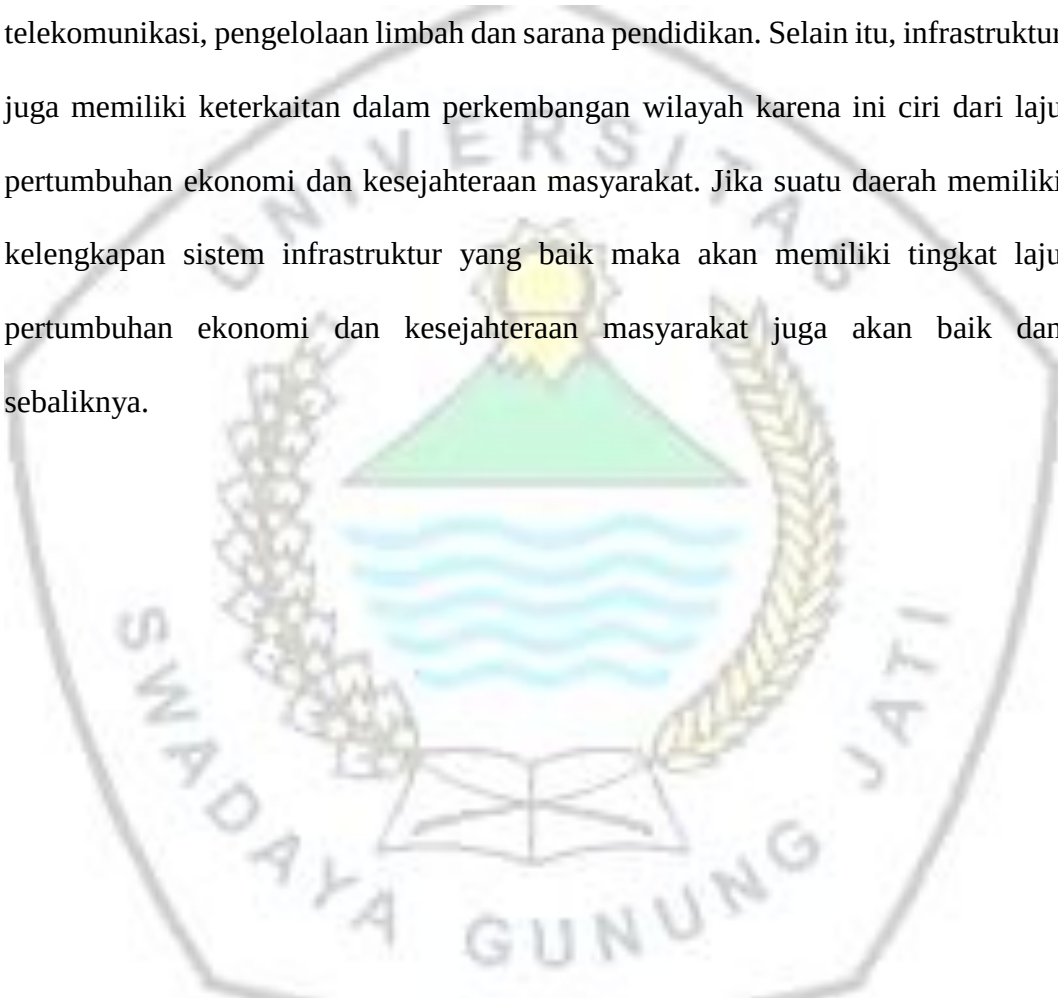
proses pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara adalah tekad atau keinginan yang disusun berdasarkan pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan secara luas. Usaha atau proses pembangunan terlihat dengan adanya kehendak untuk menentukan arahan-arahan sebagai pedoman melaksanakan pembangunan tersebut.

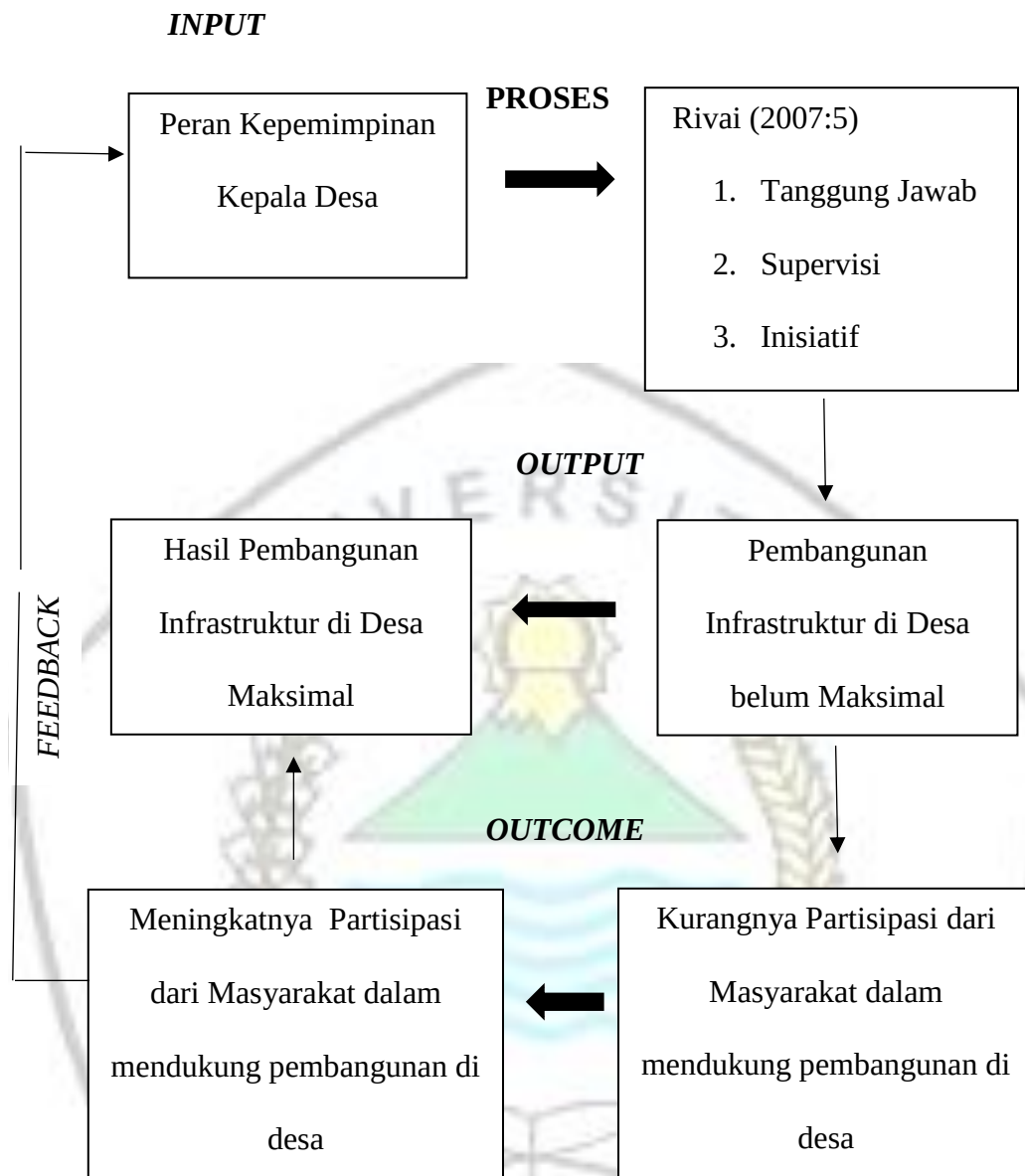
Demi terwujudnya pembangunan yang berjalan dengan baik dalam suatu desa diperlukannya partisipasi masyarakat agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar, menurut Siagian (2005:4) ada 7 ide pokok pembangunan :

1. Pembangunan merupakan suatu proses, berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari suatu yang tanpa akhir (*never ending*).
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, jika dalam rangka kehidupan seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
3. Pembangunan dilaksanakan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. pertumbuhan dimaksud sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa harus bersifat antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi berbeda dari jangka ke jangka waktu yang lain, terlepas dari apakah situasi berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan kata lain suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan status quo yang ada.
5. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas diartikan cara hidup yang baruakan lebih dari sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat dan fleksibel.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi multidimensional, artinya modernitas mencakup seluruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat menjangkau dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan.

7. Semua hal yang telah dibahas ditinjau kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang sejajar dengan bangsa- bangsa lain didunia karna mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain.

Istilah infrastruktur lebih mengarah ke infrastruktur teknis dan fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas jalan, air bersih, perlistrikan, telekomunikasi, pengelolaan limbah dan sarana pendidikan. Selain itu, infrastruktur juga memiliki keterkaitan dalam perkembangan wilayah karena ini ciri dari laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika suatu daerah memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang baik maka akan memiliki tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga akan baik dan sebaliknya.





Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

1.7 Definisi dan Konsep Oprasional Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Definisi Konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut :

1. Kepemimpinan dalam konteks struktural tidak hanya terikat pada bidang atau sub bidang yang menjadi garapannya, tetapi juga oleh rumusan tujuan dan program pencapaiannya yang telah ditetapkan oleh pemimpin yang lebih tinggi posisinya. Setiap anggota harus melaksanakan tanpa menyimpang. Sehingga dalam hal ini kepemimpinan diartikan sebagai proses pemberian motivasi agar orang-orang yang dipimpin melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
2. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya, keadaan yang lebih baik yang didambakan oleh masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan.
3. Infrastruktur memiliki keterkaitan dalam perkembangan wilayah karena ciri dari laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting dalam suatu negara karena infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi

1.7.2 Operasional Variabel

Tabel 1.1

Konsep Operasional Variabel

Konsep	Dimensi	Parameter
Kepemimpinan (Rivai 2007:5)	1. Tanggung Jawab	1. Koordinasikan 2. Pengawasan/Pemantauan
	2. Supervisi	1. Meningkatkan Pembangunan 2. Pembinaan/Pemberdayaan
	3. Inisiatif	1. Pendidikan/ Pelatihan 2. Meningkatkan Partisipasi

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti pada Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon adalah penelitian kualitatif yaitu mengetahui secara mendalam tentang Kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sebagaimana Meleong (2011 :9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti.

1.8.2 Informan Dan Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian, serta dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Adapun informan yang dimaksud adalah :

1. informan kunci (informan key)

informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Setu Kulon Kabupaten Cirebon

2. informan pendukung

informan pendukung penelitian yaitu Perangkat Desa Setu Kulon dan Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data menjalankan bagaimana sumber yang diperoleh dan data mana yang diperoleh. Dalam penelitian ini penyusunan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya :

1. Studi Literature (Kepustakaan)

Data yang diperoleh penulis secara langsung seperti laporan-laporan, literature, arsip-arsip, jurnal dan sumber keterangan lain yang dapat mendukung pembahasan ini.

2. Studi Lapangan

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap apa yang menjadi objek penelitian.

3. Wawancara

Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dari teknik pertama, dimana besar kemungkinan data-data yang tidak terjaring dalam angket, maka dipergunakan teknik wawancara, teknik ini dilakukan langsung berhadapan dengan subjek penelitian, dimana wawancara ini untuk menjawab beberapa pertanyaan sesuai penelitian.

4. Observasi

Penulis menggunakan pengamatan langsung dilapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan di penelitian ini.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Setiap penelitian harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Sugiyono (2017:270-276) berpendapat bahwa upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Perpanjang pengamatan

Peneliti kemabali lagi ke lapangan melakukan pengamatan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh maupun untuk menemukan data-data yang baru.

b. Tringulasi

Tringulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tringulasi sumber, tringulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

c. Analisis kasus negative

Peneliti mencari data yang berbeda atau yang bertentangan dengan temuan data sebelumnya. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

d. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti.

e. Mengadakan membercheck

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaan tajam maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Dalam memenuhi keabsahan data

penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber data dan melakukan membercheck.

1.8.5 Teknis Analisis Data

Kegiatan berikutnya setelah terkumpulnya data adalah menganalisis data. Menurut Bogdan dan Biklendam (Moleong, 2011:248), analisis data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, tahapan analisis data meliputi antara lain :

1. Reduksi data (*Data Reduction*), merupakan suatu bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir tersusun. Jadi, dalam penelitian kualitatif reduksi data tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui ringkasan atau uraian singkat atau uraian singkat. Menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.
2. Penyajian data (*Data Display*), merupakan alur kedua yang penting dalam kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dan apa yang harus dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (*Conclusion Drawing / Verification*), merupakan kegiatan analisis data yang ketiga dalam penelitian kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Desa Setu Kulon yang beralamat di Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dengan mempertimbangkan :

- a. Mempertimbangkan bahwa peneliti tertarik untuk membahas Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur karena pada dasarnya Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus penanggung jawab atas jalannya roda

pemerintahan dan pembangunan didalam wilayahnya, apapun bentuk dan tujuannya itu berdasarkan berbagai visi untuk mencapai tujuan dari suatu pemerintahan.

- b. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan sampel yang digunakan responden sebagai data primer dan skunder.
- c. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis, selain itu juga penelitian dilakukan pada Desa Setu Kulon adalah karena ingin tahu bagaimana Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Setu Kulon

